P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

Samuka Vol. 10, No. 1: hlm 10-22
SAMUKA
Jurnal Samudra Ekonomika
https://ejurnalunsam.id/index.php/jse

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE LEVEL OF POVERTY IN THE SPECIAL AUTONOMY ERA - ACEH: LOOKING AT THE DEGREE OF INDEPENDENCE AND FISCAL DECENTRALIZATION POLICY OF THE REGION

Dian Maulana Rizki[1], Zikriatul Ulya[2*], Tajul Ula[3]
Email. *) Zikriatululya@iainlangsa.ac.id

[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa

Received: 26/01/2026; Accepted: 28/02/2026; Published: 04/03/2026

Abstract

Poverty in Aceh province is still relatively high, on the other hand the Aceh government has been supported by the existence of special autonomy funds. This study aims to analyze the effect of the degree of independence and fiscal decentralization policies on poverty in 23 regencies/cities in Aceh province for the period 2008-2021. The research model used is a panel data regression model with the Random Effect Model (REM) approach. The results of partial testing show that the degree of independence has a negative and significant effect on poverty and fiscal decentralization policies have a positive and significant effect on poverty. Furthermore, the results of simultaneous testing show that the degree of independence and fiscal decentralization policies have a significant effect on poverty. From the results of this analysis, the Regency/City governments in Aceh province must continue to increase their sources of regional income, especially from regional taxes and regional levies so that they can increase the degree of independence and fiscal decentralization policies which have implications for economic growth and reduce the number of poverty in their regions.

Keywords: Degree of Fiscal Independence, fiscal decentralization policy, Poverty.

Abstrak

Kemiskinan di provinsi Aceh masih tergolong tinggi, disisi lain pemerintah Aceh sudah didukung dengan adanya dana otonomi khusus.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat kemandirian dan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota di provinsi Aceh periode tahun 2008 – 2021. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa

derajat kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa derajat kemandirian dan kebijakan desentralisasi fiskal bepengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil analisis ini pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh harus terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan derajat kemandirian dan kebijakan desentralisasi fiskal yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya.

Kata Kunci : Derajat Kemandirian Fiskal, Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan pembangunan nasional. karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya tendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asa desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota sebagai daerah otonomi. Selain itu. juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pamerintah daerah, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang- Undang tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan (Rinaldi, 2017).

Dengan pemberian otonomi khusus kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Muhammad, 2020). Disamping itu, melalui otonomi khusus ah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut Agung dan Candika (2017), Dalam menjalankan otonomi khusus daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia sebagai daerah penerima dana otonomi khusus (Otsus) pada saat konflik di Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

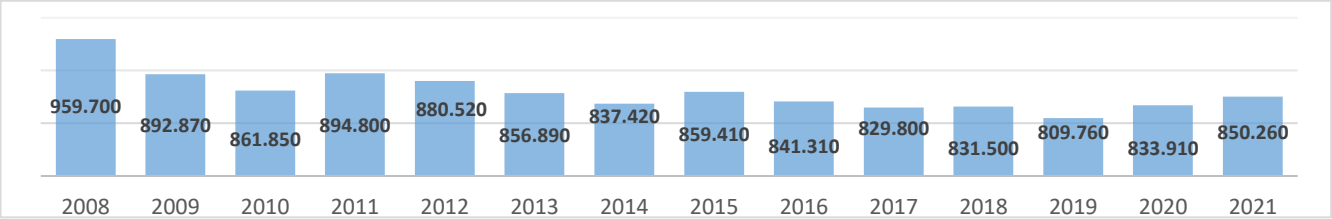
perekonomian. Namun pada tahun 2021 provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatera, karena dana otonomi khusus dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum di manfaatkan secara baik, dan dana otonomi khusus belum mampu untuk mendorong pemecahan masalah pada kemiskinan.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus diatasi atau paling tidak dikurangi. Kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan yang cukup besar, dimana hingga sekarang masih belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir. Alamanda (2020) menyatakan kemiskinan adalah keterbatasan atau kekurangan yang di sandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi kehidupan.

Badan Pusat Statistik (2021) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang tercermin dalam kondisi seseorang yang mengalami kekurangan gizi, perumahan tidak layak huni, rendahnya kesehatan, dan pendidikan yang masih rendah. Selain itu, kemiskinan sebagai suatu permasalahan juga akan menyebabkan permasalahan baru, seperti memperbesar angka pengangguran, memperbesar resiko kriminalitas dan lain sebagainya. Dapat dilihat rata-rata tingkat kemkskinan di Aceh pada Garfik sebagai berikut:

Gambar 1

Rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan Gambar 1 diketahui rata-rata tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dari jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni tahun 2017-2021 mengalami kondisi fluktuatif dengan tren menurun. Tercatat peningkatan persentase tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang dinilai dapat berkontribusi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan pada daerah-daerah adalah derajat kemandirian dan kebijakan desentralisasi fiskal. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah misalkan seperti memiliki derajat kemandirian pada pemerintah daerah.

Derajat kemandirian menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya dengan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Zukhri, 2020). suatu daerah dapat dilihat pada Pemerintah daerah yang dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan serta kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin besar rasio atau derajat kemandirian keuangan suatu daerah menggambarkan bahwa semakin menurun ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan melalui otonomi daerah (Choiroel, 2020).

Adanya otonomi suatu daerah memberikan kewenangan kepada masing masing suatu daerah untuk mampu mengelola suatu daerah untuk tujuan lebih luas. Pemerintah suatu daerah di harapkan mampu menggali sumber penghasilan pendapatan asli suatu daerah sehingga akan meningkatkan tingkat angka kemandiriannya terhadap pusat. Menurut Aghata dkk (2021), Dalam kebijakan fiskal terdapat komponen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu pengeluaran pemerintah dimana dalam teori ekonomi Keynes terdapat efek multiplier atau angka pengganda akibat penambahan jumlah konsumsi pemerintah yang berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi serta dapat menambah tingkat kesempatan kerja.

Dalam hal ini, kebijakan desentralisasi fiskal diatur langsung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur urusan keuangan, termasuk pajak daerah. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal ini berfungsi untuk mendorong kemandirian daerah. Implikasinya adalah daerah dituntut untuk bisa membiayai secara mandiri biaya pembangunannya. Oleh karena itu, pelimpahan tugas yang diemban oleh pemda dalam otonomi harus disertakan dengan pelimpahan keuangan. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam aspek pengelolaan keuangan yaitu adanya kebijakan desentralisasi fiskal.

LANDASAN TEORI

Derajat Kemandirian

Derajat kemandirian menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya dengan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Zukhri, 2020).

Kebijakan Desentralisasi Fiskal

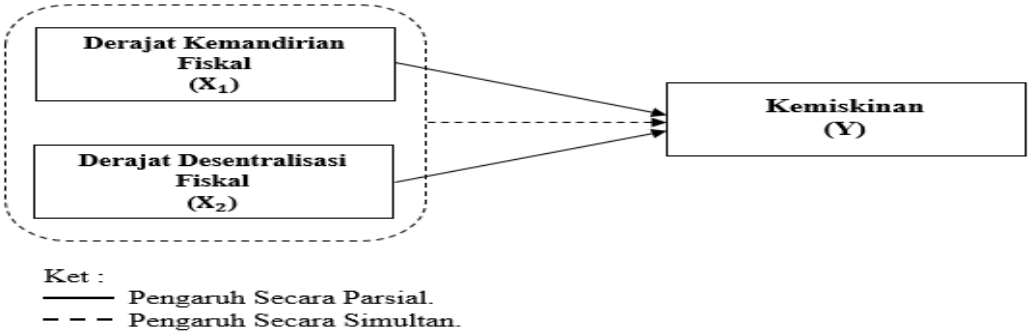
Menurut Tiangboho (2021) Kebijakan desentralisasi fiskal Merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi secara konseptual. Artinya desentralisasi fiskal membuat suatu daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar lebih mandiri.

Kemiskinan

BPS (2021) kemiskinan merupakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kebutuhan dasar hidup meliputi kebutuhan pemenuhan makanan kebutuhan pemenuhan sandang, kebutuhan pemenuhan tempat tinggal, kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar ,jika masyarakat berada pada kondisi yang miskin, maka masyarakat tersebut berarti tidak mampu mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut sehingga hidupnya menjadi tidak sejahtera atau tidak layak, dengan kata lain hidup dalam kondisi miskin.

KERANGKA TEORI

Gambar 2.
Kerangka Teori.



Dari gambar 2 dapat dijelaskan terdapat variabel independen yaitu derajat kemandirian fiskal (X_1) dan derajat desentralisasi fiskal (X_2), variabel dependennya yaitu kemiskinan (Y). Selain itu dari gambar 2.1 terdapat garis-garis yang menjelaskan bahwa kemandirian fiskal dan kemampuan fiskal berpengaruh terhadap kemiskinan secara parsial dan simultan.

METODE PENELITIAN

Menurut Jaka (2015) Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data) yaitu gabungan antara data deret waktu (time series) dan dengan data beberapa objek pada suatu waktu tertentu (cross section) dengan pengolahan data menggunakan software Eviews 9. Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Kabupaten atau Kota di provinsi Aceh, dan data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kemiskinan, pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan penerimaan daerah, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021. Metode ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model seperti ini dikatakan sebagai model paling sederhana dimana pendekatanya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel yang hanya mengkombinasikan data *times series* dan data *cross sections.* Model ini tidak memperhatikan waktu atau individu yang berarti perilaku data adalah sama dalam berbagai periode waktu. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut:

$$Yit = \alpha + \beta Xit + \varepsilon it$$

Dimana:

Y = Kemiskinan,

a = Konstanta,

X1, X2 = Derajat Kemandirian dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal,

b = Koefisien regresi,

e = *Error terms*,

t = Periode waktu/tahun, dan

i = *cross section* (individu)/daerah.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan dengan mengasumsikan bahwa *intersep* dan koefisien *regressor* dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah atau daerah maupun unit waktu. Salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* atau unit *times series* adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas uit *cross section* maupun unit *times series*. Model dalam analisis ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LDSV). Dengan model sebagai berikut:

$$Yit = \alpha i + \beta j X_{it}^{j} + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i D_i + \varepsilon it$$

Dimana:

Y = Kemiskinan,

a = Konstanta,

X1, X2 = Derajat Kemandirian dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal,\

b = Koefisien regresi,

e = *Error terms*,

t = Periode waktu/tahun, dan

ia1 = *variabel dummy*

i = *cross section* (individu)/daerah

3. *Random Effect Model* (REM)

Model dalam penelitian ini mengestimasi data panel dengan model *fixed effect* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastianmodel yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel *residual* yang dikenal dengan model *random effect*. Pendekatan *random effect* memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan *error* dari *cross-section* dan *time series*. Dalam estimasi random effect, selisih intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing negara. Model ini juga dapat disebut dengan teknik *Error Component Model (*ECM) atau *Generalized Least Square (GLS)*. Dengan model sebagai berikut:

$$\mathbf{Yit = X1it\ \beta it + vit.}$$

Dimana: vit =ci + dt + εit. ci adalahKonstanta yang berhubungan atau bergantung pada i dan dt adalah konstanta yang bergantung atau terkait dengan t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil *Chow Test*

Pengujian ini untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), maka digunakan uji F *Restricted* dengan membandingkan nilai *cross-section* F. Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *cross-section* F > α (0,05) maka model *common effect model* (CEM) yang digunakan sehingga H0 : diterima dan Ha: ditolak
2. Jika nilai probabilitas *cross-section* F < α (0,05) maka model *fixed effect model* (FEM) yang digunakan sehingga H0 : ditolak dan Ha: terima

Hasil uji *chow test* dapat dilhat pada table sebagai berikut:

Tabel. 1
Hasil *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1522.562575	(22,297)	0.0000
Cross-section Chi-square	1524.440725	22	0.0000

Sumber : Hasil Eviews 9 (2022)

Berdasarkan hasil uji *chow test* pada tabel 1 di atas diperoleh nilai *Cross Section* F probabiliti sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect model* (FEM) maka H0 : diterima dan Ha : ditolak.

2. Hasil *Hausman Test*

Pada uji *Hausman test* dilakukan untuk memilih model mana yang lebih efektif antara random effect model (REM) atau *fixed effect model* (FEM). Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila skor *cross-section random* prob < 0,05, maka model *fixed effect model* yang digunakan maka H0 : diterima dan Ha: ditolak
2. Bila skor cross-section random prob > 0,05, maka model *random effect model* yang digunakan maka H0 : ditolak dan Ha: terima

Hasil dari uji Hausman test dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.032970	2	0.1331

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 2 hasil uji *Hausman test* menunjukkan bahwa nilai *Cross-section* probabiliti sebesar 0,000 < 0,05 sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect model* (FEM) maka H0 : diterima dan Ha : ditolak.

3. Hasil Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier test adalah pengujian statistik sebagai dasar penentuan dalam memilih apakah menggunakan *Random Effect Model* (REM) atau *Common Effect Model* (CEM). Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai both > α (0,05 maka model *random effect model* yang digunakan maka H0 : diterima dan Ha; ditolak
2. Jika nilai both < α (0,05) maka model *common effect model* (CEM) yang digunakan sehingga H0 : ditolak dan Ha: diterima

Hasil uji *Lagrange Multiplier* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil *Lagrange Multiplier Test*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both

Breusch-Pagan	1971.005	3.788169	1974.793
	(0.0000)	(0.0516)	(0.0000)
Honda	44.39600	-1.946322	30.01645
	(0.0000)	--	(0.0000)
King-Wu	44.39600	-1.946322	25.51402
	(0.0000)	--	(0.0000)
Standardized Honda	46.11683	-1.771482	27.97136
	(0.0000)	--	(0.0000)
Standardized King-Wu	46.11683	-1.771482	23.35512
	(0.0000)	--	(0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	1971.005
			(< 0.01)

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji *Lagrange Multiplier test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai both < 0,05 (0,0000 < 0,05) yang menunjukkan bahwa tolak H_0 terima H_1. Sehingga model yang digunakan adalah model *Random Effect Model* (REM).

4. Hasil Uji Goodnes of Fit

Hasil uji *Goodnes of Fit* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Random Effect Model* (REM). Hasil pengolahan data dengan menggunakan *Random Effect Model* pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.43362	5.362876	7.539541	0.0000
KDF	1.377647	0.334643	4.116766	0.0000
DK	-1.773716	0.332494	-5.334586	0.0000

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	25.65815	0.9903
Idiosyncratic random	2.539633	0.0097

Weighted Statistics

R-squared	0.221244	Mean dependent var	0.993481
Adjusted R-squared	0.216361	S.D. dependent var	2.878011
S.E. of regression	2.547712	Sum squared resid	2070.577
F-statistic	45.31377	Durbin-Watson stat	0.699509
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah (2022)

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut :

POV = 40.43362 + 4.116766DDF -5.334586KMF + e. ……..… (4)

Dari hasil estimasi, nilai *signifikansi statistik* F sebesar (0.000000 < 0,05), maka model yang dipakai. Kebijakan desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Nilai konstanta sebesar 40.43362 mengandung arti bahwa jika nilai derajat kemandirian dan kebijakan desentralisasi fiskal adalah sebesar 0, maka kemiskinan akan sebesar 40.43362

5. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Berikut dapat dilihat pada table penjelasan hasil uji T menunjukkan bahwa:

1. Derajat kemandirian (X_1) terlihat pada tabel 4 memiliki probabilitas sebesar 0,0000 (lebih kecil dari α 0,05) dan nilai t-statistic sebesar -5.334586. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel derajat kemandirian fiskal dengan kemiskinan. Dengan demikian H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.
2. Kebijakan desentralisasi fiskal (X_2) terlihat pada tabel 4 memiliki probabilitas sebesar 0,0000 (lebih kecil dari α 0,05) dan nilai t-statistic sebesar 4.116766. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kebijakan desentralisasi fiskal dengan kemiskinan. Dengan demikian H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.

6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Berdasarkan pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai F-statistik dalam model ini adalah sebesar 45.31377 dengan probabilitas sebesar (0.000000 < α 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kemandirian fiskal dan desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh signifikansi terhadap kemiskinan.

7. Hasil Koefisien Determinasi (R_2)

Uji koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini variabel independen antara lain, kemandirian fiskal dan desentralisasi fiskal dan variabel dependen adalah kemiskinan. Pada tabel 4.4 dapat diketahui R_2 dalam model ini adalah sebesar 0.221244, yang artinya sebesar 22.20% variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan model, sedangkan 77.80% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Derajat Kemandirian Fiskal Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel derajat kemandirian terhadap kemiskinan. Hal ini dibuktikan oleh hasil nilai yang di peroleh t-statistic sebesar -5.334586 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 (lebih kecil dari α 0,05), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat derajat kemandirian maka akan menurunkan angka kemiskinan.

Dengan adanya otonomi khusus pemerintah sudah bisa mengurangi penduduk miskin di wilayahnya. Seperti yang telah diketahui, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di daerahnya. Sehingga hal ini menjadi isu utama bagi daerah, dimana setiap pendapatan daerah harus mampu untuk membiayai penanganan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya derajat kemandirian dilihat dari kemampuan keuangan daerah, dimana saat derajat kemandirian suatu daerah meningkat, maka dapat menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan prakoso et.al (2019) yang menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan. Hal ini dibuktikan oleh hasil nilai yang di peroleh t-statistic sebesar 4.116766 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 (lebih kecil dari α 0,05), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat kebijakan desentralisasi fiskal maka akan menambah angka kemiskinan.

Kebijakan desentralisasi fiskal menjadi salah satu kebijakan yang muncul akibat penerapan otonomi daerah yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, mencakup tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam menganalisis berbegai masalah domestik akan lebih kuat. Desentralisasi merupakan simbol adanya Thrust (kepercayaan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ini akan dengan sendirinya akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah, kalau dalam sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

Penelitian ini sejalan dengan Agatha et.al (2021), yang menunjukkan dengan adanya kebijakan desentralisasi Fiskal dapat membantu menyelesaika masalah Pengentasan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa derajat kemandirian fiskal memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, maka hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila kemandirian fiskal meningkat maka akan menurunkan kemiskinan. Artinya, semakin meningkatnya kemandirian fiskal maka akan mengurangi angka kemiskinan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, maka hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran dan tujuan desentralisasi fiskal di Aceh belum berjalan dengan maksimal sehingga angka kemiskinan menjadi bertambah, hal ini terjadi karena kurang baiknya pemerintah dalam mengelola dana otonomi khusus, dan program-program yang dijalankan tidak tepat sasaran, sehingga angka kemiskinan menjadi bertambah.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan penulisan, maka saran yang dapat di berikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal harus terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dan dapat menurunkan jumlah kemiskinan didaerahnya.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh juga harus memperketat pengawasan dan tata kelola terhadap pendapatan asli daerah dan dana dari pusat agar lebih efisien dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga harus memanfaatkan dana otonomi khusus untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar menurunkan angka kemiskinan dan juga pemerintah harus meningkatkan atau memperbaiki berbagai fasilitas masyarakat seperti jalan, listrik dan lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Syahputra, R. 2017. Analisis Derajat Desentralisasi Atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Aceh Tamiang. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1. No. 1. https://doi.org/10.1234/jse.v1i1.62

Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol. 4. No. 1. Https://Doi.Org/10.31002/Rep.V4i1.1344

Sanogo, Tiangboho. 2021. Does fiscal Decentralization Enhance Citizens' Access to Public Services and Reduce Poverty? Evidence from Côte d'Ivoire Municipalities in a Conflict Setting. Hal Open Science: World Development, Elsevier. pp.204-221. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01875189

Sriyana, Jaka. 2015. Metode Regresi Data Panel : Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia. Yogyakarta: Ekonesia, FE UII https://library.fbe.uii.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5047

Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. 2020. Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo. Vol.6. No. 2. https://dx.doi.org/10.35906/jep01.v6i2.625

Agatha, Shellenia Vitara, Beta Andri Anggiano Uliansyah. 2021. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. Jurnalku. Volume 1 Nomor 3. https://dx.doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.30

Handayani, M.,dkk. 2021. Analisis kemandirian dan kemampuan keuangan daerah terhadap kemiskinan di kabupaten bogor. Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis. h. 23 https://repository.ubharajaya.ac.id/10407/1/jurnal.pdf

Alamanda. 2020. The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty in Indonesia. Journal Homepage Info Artha. Vol. 4. No. 1. https://dx.doi.org/10.31092/jia.v4i1.614

BPS Indonesia. 2021. Statistik Indonesia. BPS Indonesia. Jakarta https://www.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html

Kadafi, Muhammad. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal. Vol. 3. No. 2. https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.32033

Ridwan, Agung, Syaparuddin dan Candra Mustika. 2017. Pengaruh Sumber Pembiayaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB dan Tingkat Kemiskinan (Studi di Kabupaten Kota di Provinsi Jambi). Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol. 12 No. 2. https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3944

Zukhri, N. 2020. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik. Vol. 5. No. 2. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213

BPK, "Laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 dan 2019", www.bpk.go.id. Di unduh pada tanggal 19 maret 2022.

Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 18. No.1 https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/5299

Suharyo. 2018. Otonomi khusus Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi penindihan hokum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 18. No.3. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-3188

Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill". Vol. 8. No. 2. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947